

ABSTRAK

Partai Politik berfungsi sebagai perantara strategis antara proses pemerintahan dan rakyat. Banyak yang berpendapat bahwa partai politik pada dasarnya mengatur demokrasi. Dikutip dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjelaskan bahwa pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 banyak terjadi penggantian calon Anggota legislatif terpilih oleh partai pengusung dengan alasan yang tidak jelas. Praktik ini merusak kedaulatan rakyat karena bertentangan dengan sistem pemilu proporsional terbuka, yang menyatakan bahwa calon dengan suara terbanyak yang memegang jabatan. Dari sisi legislatif, persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas dan tata cara penggantian calon legislatif terpilih oleh partai politik dalam pemilihan umum sebelum pelantikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik sebelum pelantikan perspektif peraturan perundang-undangan, dan mengetahui bagaimana kepastian hukum penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik sebelum pelantikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Menurut temuan studi tersebut, Aturan Dasar partai politik (AD) dan aturan rumah tangga (ART) mengatur proses pemberhentian anggota partai, yang memungkinkan mereka menggantikan calon legislatif terpilih dalam pemilihan legislatif. Terdapat celah masuknya kepentingan tertentu dalam pemberhentian anggota partai politik. Pertama, Dewan Pengurus Partai di tingkat daerah dapat mengusulkan pemberhentian anggota partai, Dewan Pengurus Partai tingkat Daerah memiliki hak untuk mengusulkan nama-nama anggota partai untuk diberhentikan. Kedua, Dewan Pengurus Pusat Partai tidak lagi melakukan verifikasi ulang terkait usulan tersebut dan langsung mengeluarkan penetapan langsung. Penggantian calon legislatif terpilih oleh partai politik sejatinya telah menciderai demokrasi di Indonesia. Sehingga perlu adanya perlindungan bagi calon anggota legislatif terpilih dari sejak penetapan hingga pelantikan agar amanah rakyat Indonesia yang sudah dititipkan kepada calon legislatif terpilih tidak dicerai oleh segelintir kelompok dengan kepentingannya. Perlunya regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah terkait sistem pemilihan umum termasuk di dalamnya regulasi terkait masa tunggu anggota legislatif terpilih sampai pelantikan, agar menutup celah terjadinya penyalahgunaan kuasa oleh partai politik dengan melakukan penggantian calon anggota legislatif terpilih yang dapat merusak demokrasi di Indonesia dan mengganggu jalannya proses pelaksanaan pemilu.

Kata Kunci: Penggantian, Calon Legislatif Terpilih, Pemilu, Partai Politik

ABSTRACT

Political parties serve as strategic intermediaries between the governmental process and the people. Many argue that political parties basically dictate democracy. Quoted from the Association for Elections and Democracy (Perludem) explained that in the 2024 legislative general election, there were many replacements of elected legislative candidates by the supporting parties for unclear reasons. This practice undermines popular sovereignty because it contradicts the open proportional electoral system, which states that the candidate with the most votes holds the position. From the legislative side, the issues to be discussed in this study are the legality and procedures for replacing elected legislative candidates by political parties in general elections before inauguration. The purpose of this research is to find out and analyze how the regulation of replacing elected legislative candidates in general elections by political parties before the inauguration from the perspective of legislation, and to find out how the legal certainty of replacing elected legislative candidates in general elections by political parties before the inauguration. The method used in this research is normative legal research, while the research approaches used in this research are the Statutory Approach, Conceptual Approach and Case Approach. According to the findings of the study, political parties' Basic Rules (AD) and bylaws (ART) regulate the process of dismissing party members, which allows them to replace elected legislative candidates in legislative elections. There are loopholes for the entry of certain interests in the dismissal of political party members. First, the Party Management Board at the regional level can propose the dismissal of party members, the Regional Level Party Management Board has the right to propose the names of party members to be dismissed. Second, the Party's Central Executive Board no longer re-verifies the proposal and immediately issues a direct determination. The replacement of elected legislative candidates by political parties has actually harmed democracy in Indonesia. Therefore, there needs to be protection for elected legislative candidates from the time of determination to the inauguration so that the mandate of the Indonesian people that has been entrusted to elected legislative candidates is not harmed by a handful of groups with their interests. The need for clear and firm regulations from the government related to the general election system, including regulations related to the waiting period for elected legislative members until the inauguration, in order to close the gap for abuse of power by political parties by replacing elected legislative candidates that can damage democracy in Indonesia and disrupt the process of implementing elections.

Keywords: *Replacement, Elected Legislative Candidate, Election, Political Party*